Newsletter
Pusdatin

Volume 18 No. 8, Edisi Agustus 2021 ISSN : 1411-9196

Daftar Isi

Merdeka Ekspor Pertanian Bangun Optimisme: 7 Hari, 7 Trilyun Lebih
Halaman 1

Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dimasa Pandemi
Halaman 4

Evaluasi PDPS : Umpan Balik Terhadap Kegiatan PDPS Antara 18 Dinas Provinsi Dan Kementerian Pertanian
Halaman 5

Penilaian DUPAK Fungsional
Halaman 7

Pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral Di Kementerian Pertanian
Halaman 9

Info Data Pertanian
Halaman 12

Scan QR Code

atau akses link
pusdatin.setjen.pertanian.go.id

Merdeka Ekspor Pertanian Bangun Optimisme: 7 Hari, 7 Trilyun Lebih

Dhanang

Kegiatan Merdeka Ekspor Pertanian yang dilepas Presiden Joko Widodo memberikan optimisme baru bagi para petani dan pelaku usaha pertanian. Setidaknya, lebih dari 7 Trilyun rupiah nilai ekspor untuk 7 hari dilepas dari 17 bandara dan pelabuhan utama, pada sabtu 14 Agustus 2021.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Merdeka Ekspor merupakan eksposekinerja Kementerian Pertanian selama 2 tahun, khususnya dimasa pandemi sekaligus memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-76.

Hari kemerdekaan yang ke-76 menurut Mentan SYL adalah hari kebanggan bagi sebuah bangsa besar yaitu Indonesia yang merupakan negara ke-4 terbesar di dunia.

"Perayaan kemerdekaan adalah perayaan sebuah kebanggaan anak bangsa. Kebetulan hari ini kita yang menjalankan amanah sebagai gubernur, bupati dan ini adalah keterpanggilan kita di tengah suasana dunia, nasional yang tengah menghadapi sebuah turbulensi yang luar biasa, yaitu covid-19," papar Mentan.

Mentan mengatakan bahwa Covid-19 merupakan tantangan yang tidak ringan yang dihadapi oleh hampir semua negara.

"Bukan hanya negara besar yang sedang berjuang melawan Covid ini, tapi negara-negara kecil dan menengah pun bersama-sama menghadapinya. Dan kita belum punya obat yang mujarab menghadapi Covid ini,"ungkap Mentan.

Dalam perhelatan Merdeka Ekspor ini, Mentan menegaskan bahwa Merdeka Ekspor bukan seperti ekspor yang biasa dilakukan sebagaimana rutinitas yang dilakukan.

"Ekspor yang kita lakukan adalah ekspor yang akan menyentuh harkat dan martabat sebagai anak bangsa. Menyoal psikologi nasionalisme kita, sekaligus menjadi bagian untuk menghadirkan optimisme bangsa besar Indonesia di dalam menghadapi turbulensi dunia," tegasnya.

Tim Redaksi

Penanggung jawab
Kapusdatin

Redaktur
Kepala Bagian Umum

Editor
Andry Polos, S.Kom
Aulia Azhar Abdurachman, S.Si
Dra. P. Hanny Muliany, MM
Hani Hanifah R, S. Kom

Fotografer
Iswadi
Sri Lestari, SE

Desain Grafis
Dhanang Susatyo, SE
Rizky Purnama R, S.Kom

Sekretariat
Eli David, S.Sos, MM
Apriadi Setiawan, S.Kom, MT
Cahyani Wartianingsih, S.Kom
Marwati
Hotlanis Mangatur S, S.Kom
Musdino
Priatna Sari
Didik Pratama Saputra, S.Kom

Alamat Redaksi

PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN
Jl. Harsono RM No.3 Gd D Lantai IV
Pasar Minggu - Jakarta 12550
Telp : 021- 7805305, 7816384
Fax : 021 - 7822638
e-mail : newsletter@pertanian.go.id

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor pertanian tahun 2020 mencapai Rp. 451,8 triliun atau meningkat 15,54% dibandingkan periode sama tahun 2019 yang hanya mencapai Rp. 390,16 triliun. Adapun struktur produk ekspor masing-masing adalah 89% hasil olahan dan 11% berupa produk segar.

Sementara itu, hingga semester-I yakni Januari – Juni 2021, nilai ekspor mencapai Rp. 277,95 triliun atau meningkat 40,29% dibandingkan periode sama tahun 2020 yang hanya mencapai Rp. 198,13 triliun. Dengan struktur produk ekspor masing-masing adalah 91,75% hasil olahan dan 8,29 % berupa produk segar.

Merdeka Ekspor sendiri telah dilaunching langsung oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Bogor secara serentak dilakukan dari 17 pintu ekspor yaitu, Pelabuhan Laut Tanjung Priok Bandar Udara Soekarno Hatta, Pelabuhan Laut Tanjung Perak, Pelabuhan Laut Tanjung Mas, Pelabuhan Laut Belawan, Pelabuhan Laut Makassar New Port, Pelabuhan Laut Jetty Balikpapan, Pelabuhan Laut Dumai, Pelabuhan Laut Panjang, Pelabuhan Sungai Boom Baru, Bandar Udara Hang Nadim, Pelabuhan Laut Trikora, Pelabuhan Laut Talang Duku, Pelabuhan Laut Dwikora, dan Pelabuhan Laut Bitung.

“Pertanian adalah satu kekuatan dan pilar akan hadirnya kekuatan negara, pertanian adalah penyangga utama, ayo kita hadirkan optimisme dalam Merdeka Ekspor ini,” tutupnya.

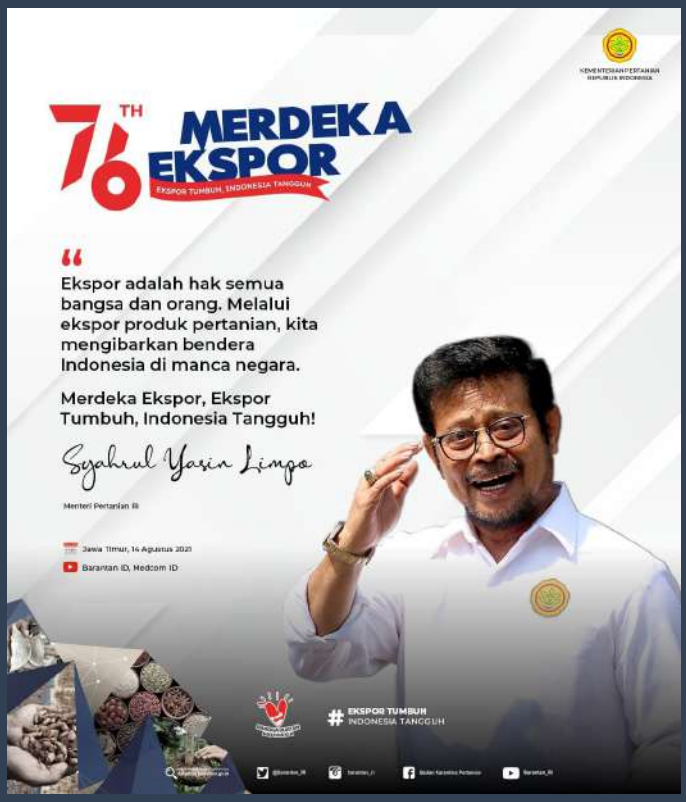

Peran Sektor Pertanian Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Dimasa Pandemi

Heri

Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis data tenaga kerja hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021. Sakernas sendiri dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada Februari dan Agustus. Untuk data Sakernas Februari 2021 diperoleh dari seluruh wilayah Republik Indonesia. Besarnya sampel Sakernas Februari 2021 sebanyak 7.500 blok sensus (BS) atau 75.000 rumah tangga. Sakernas Februari 2021 dikumpulkan untuk memperoleh estimasi data ketenagakerjaan yang representatif hingga tingkat Provinsi. Pengumpulan data ketenagakerjaan sektor pertanian didasarkan dari hasil Sakernas BPS yang merupakan survey khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan secara umum. Selain itu, Sakernas Februari 2021 juga mempunyai tujuan khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Tenaga kerja sendiri adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun dan lebih.

Dari hasil Sakernas Februari 2021, jumlah Angkatan Kerja yang bekerja sebesar 131,06 juta jiwa. Untuk tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) sendiri, jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian pada Februari 2021 berjumlah 36,12 juta orang, yang terdiri dari jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 22,25 juta jiwa dan tenaga kerja perempuan sebanyak 13,87 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan Bulan Februari tahun 2020 yang sebesar 35 juta orang, maka angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,20%. Tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) tersebut tersebar ke dalam empat subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Untuk penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan, pada Bulan Februari 2021 mencapai 17,35 juta orang (48,03%) dari seluruh penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Subsektor ini merupakan subsektor yang paling tinggi menyerap tenaga kerja dibanding subsektor lainnya di lingkup pertanian. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Februari 2020 penduduk yang bekerja di subsektor tersebut mencapai 17,64 juta orang, sehingga mengalami peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di subsektor tanaman pangan sebesar 0,73%. Lalu jumlah penduduk yang bekerja di subsektor hortikultura sebesar 3,61 juta orang (10,01%), jika dibandingkan dengan periode yang sama Februari tahun 2020 yang sebesar 3,17 juta orang, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di subsektor hortikultura sebesar 14,10%.

Kemudian Penduduk yang bekerja di subsektor perkebunan pada Februari 2021 mencapai sebesar 9,86 juta orang (27,30%) dari total tenaga kerja di sektor pertanian. Jika dibandingkan dengan periode yang sama Februari 2020 yang berjumlah 10,31 juta orang, maka tenaga kerja di sector perkebunan mengalami penurunan sebesar 4,38%. Dan Untuk penduduk yang bekerja di subsektor peternakan pada Bulan Februari 2021 mencapai 5,30 juta orang (14,66%) dari total tenaga kerja sektor pertanian. Jika dibandingkan dengan periode yang sama

Februari tahun 2020 jumlah tenaga kerja subsektor peternakan yang sebesar 4,30 juta orang, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 23,26%.

Dari data tersebut, sektor pertanian mulai dilirik oleh masyarakat dan menjadi salah satu peluang usaha yang mulai diminati. Dimasa pandemi Covid-19 turut memicu perpindahan penduduk dari kota menuju desa yang biasa juga dikenal dengan ruralisasi, ini turut berpengaruh terhadap peningkatan tenaga kerja pertanian di perdesaan. Kondisi ini rupanya dianggap menjadi peluang bagi masyarakat untuk menambah penghasilan, ini menujukkan bahwa tenaga kerja sektor pertanian dinilai tangguh terhadap goncangan krisis, serta menjadi tumpuan dan harapan untuk ekonomi kita tetap bisa bangkit pada saat pandemi covid-19. Sebagai tambahan, bahkan dalam rilis Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor sektor pertanian pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 33,04% dibandingkan bulan Mei pada tahun yang sama atau sebesar 15,19% secara (Y-on-Y) dibulan yang sama tahun lalu. Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah-rempahan, dan kopi memberi andil besar dalam ekspor selama Juni 2021.

Evaluasi PDPS : Umpan Balik Terhadap Kegiatan PDPS Antara 18 Dinas Provinsi Dan Kementerian Pertanian

Hanny

Ketersediaan data sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan dan hortikultura yang akurat dan terkini mutlak diperlukan, baik oleh pemerintah maupun *stakeholder* terkait untuk perumusan dan perencanaan kebijakan pemerintah dan dunia usaha serta menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di sektor pertanian. Kerjasama selama ini sudah berjalan dalam pengelolaan Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Data dan Sistem Infomasi Pertanian (Pusdatin), Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan Penguatan Data Pangan Strategis (PDPS) saat ini telah memasuki tahun yang ke-3 untuk PDPS Tanaman Pangan dan tahun ke-2 untuk PDPS Hortikultura dimana kegiatan ini masih sangat penting. Berbeda dengan tahun sebelumnya, di tahun ke-3 ini Ditjen. Tanaman Pangan pengembangan aplikasi Sistem Informasi PDPS atau SI PDPS yang merupakan aplikasi yang berbasis spasial yang diharapkan akan menyempurnakan aplikasi PDPS Pusdatin, sehingga ditahun ini PDPS Pusdatin tetap berjalan secara berdampingan dengan aplikasi SI PDPS sampai dengan stabilnya aplikasi SI PDPS.

Sejak berlangsungnya kegiatan PDPS tahun 2019, Pusdatin secara rutin melaksanakan evaluasi sebanyak dua kali dalam setahun. Tidak seperti pelaksanaan evaluasi tahun sebelumnya, dilakukan secara tatap muka. Sejak tahun 2020 dengan merebaknya Pandemic Covid 19 maka pelaksanaan evaluasi dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Evaluasi PDPS dilaksanakan secara 3 tahap menurut Zona waktu barat dan tengah. Waktu pelaksanaan tanggal 13 Juli 2021 diikuti oleh petugas pengelola data tanaman pangan dan hortikultura dari provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Lampung. Pelaksanaan tanggal 14 Juli 2021 diikuti dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Terakhir pada tanggal 15 Juli 2021 diikuti dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.

"Pertemuan ini, selain untuk bersilahturahmi dan berkenalan dengan petugas PDPS walaupun hanya melalui virtual, dan juga akan dilakukan evaluasi kegiatan PDPS terutama terkait dengan laporan pemasukan aliran data luas tanam, luas panen dan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura" kata Kapusdatin dalam sambutan pembukaannya. Masih dalam kesempatan yang sama Kapusdatin juga menyampaikan, "Berdasarkan monitoring laporan pemasukan aliran data per tanggal 6 Juli 2021 bulan Januari - Juni 2021 untuk laporan pemasukan data padi sebesar 85,85%, palawija sebesar 84,63 persen. Sedangkan Hortikultura untuk data SBS sebesar 79,26 persen, data BST sebesar 80,82 persen, data TH sebesar 82,32 dan data TBF sebesar 82,39 persen. Oleh karena itu perlu perhatian dan dukungan dari petugas pengelola data tanaman pangan dan hortikultura dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk selalu memonitor dan tepat waktu dalam pelaporan tersebut. Harapan dari pertemuan ini akan terus berkelanjutan, sehingga dapat memperoleh informasi dari daerah terkait dengan kendala dilapangan dalam pelaksanaan pengumpulan data sehingga ke depan akan menjadi lebih baik lagi dan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas statistik tanaman pangan dan hortikultura, kata Kapusdatin.

Sektor Pertanian mempunyai ciri khas tersendiri yang sangat tergantung sektor lain seperti cuaca dan perilaku petani serta

konsumen, dimana faktor unik tersebut sangat berpengaruh terhadap dinamika data sektor pertanian. Beragamnya situasi dan kendala di lapangan, namun tidak menyurutkan pelaporan petugas PDPS. Apresiasi terhadap upaya pelaporan data tanaman pangan dan hortikultura melalui aplikasi PDPS, kata Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS.

Penyampaian materi oleh narasumber dari Pusdatin mencakup Tinjauan Umum, Evaluasi PDPS Tanaman Pangan dan Evaluasi PDPS Hortikultura. Antusiasme yang tinggi dari peserta evaluasi terhadap kegiatan PDPS yang telah berlangsung selama 3 tahun ini, terlihat dari penyampaian beberapa permasalahan pelaksanaan maupun saran perbaikan terhadap aplikasi PDPS tanaman pangan maupun hortikultura.

Kegiatan pengumpulan data Tanaman pangan masih perlu banyak pembenahan terutama setelah terjadi perubahan metodologi. Pusdatin tetap mengharapkan dukungan Dinas Pertanian di daerah terhadap kelangsungan pelaporan data Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Aplikasi PDPS, ujar Koordinator Kelompok Data Komoditas Pusdatin di akhir acara evaluasi.

Penilaian DUPAK Fungsional

Dhanang

Dalam rangka pengelolaan data dan informasi pertanian sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian pasal 1159 yang menyatakan bahwa Pusat Data dan Sistem Inforrnasi Pertanian (Pusdatin) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengolahan, analisis dan pengembangan sistem informasi pertanian serta pelayanan dan publikasi data dan informasi pertanian, maka pada tanggal 12 – 14 Agustus 2021 Pusdatin melaksanakan acara Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk para fungsional statistisi dan pranata komputer bertempat di Hotel Santika Premiere ICE BSD II.

Penilaian DUPAK ini dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan Juli, tetapi dikarenakan adanya PPKM darurat maka pelaksanaan bulan Juli mundur di bulan Agustus.

Acara Penilaian DUPAK ini secara resmi dibuka oleh Sub Koordinator Sub Kelompok Tata Usaha (Bapak Wibisono) yang mewakili Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Kapusdatin).

Selain dari Pusdatin, para peserta yang hadir sebagai tim penilai adalah : (a) Badan Karantina Pertanian, 1 orang; (b) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 1 orang; (c) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, 1 orang; (d) Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, 1 orang dan (e) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, 1 orang.

Penilaian DUPAK edisi Agustus ini adalah untuk menilai sebanyak 10 orang fungsional statistisi yang terdiri dari : (a) Pusdatin, 2 orang; (b) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, 4 orang; (c) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, 3 orang dan (d).

Selain itu ada 61 orang fungsional pranata komputer yang terdiri dari : (a) Pusdatin, 18 orang; (b) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, 2 orang; (c) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 1 orang; (d) Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, 2 orang; (e) Balai Besar Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 1 orang; (f) Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, 1 orang; (g) Balai Besar Veteriner Maros, 1 orang; (h) Balai Besar Veteriner Wates, 1 orang; (i) Balai Inseminasi Buatan Lembang, 1 orang; (j) Balai Pelatihan Pertanian Jambi, 1 orang; (k) Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari, 2 orang; (l) Balai Penelitian Tanaman Industri Dan Penyegar, 1 orang; (m) Balai Veteriner Banjarbaru, 1 orang; (n) Balai Veteriner Lampung, 2 orang; (o) Biro Hubungan Masyarakat Dan Informasi Publik, 1 orang; (p) Biro Organisasi Dan Kepegawaian, 2 orang; (q) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, 1 orang; (r) Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, Dan Informasi Perkarantinaan, 1 orang; (s) Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian, 1 orang; (t) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hortikultura, 1 orang; (u) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perkebunan, 1 orang; (v) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, 1 orang; (w) Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian, 3 orang; (x) Sekretariat Badan Ketahanan Pangan, 2 orang; (y) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, 5 orang; (z) Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura, 1 orang; dan (aa) Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 3 orang.

Pemanfaatan Katalog Elektronik Sektoral Di Kementerian Pertanian

Lilik W

Mentan Menjajaki Katalog Elektronik Sektoral di LKPP, (Sumber foto: IG LKPP)

Aplikasi katalog elektronik atau e-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. e-Katalog merupakan portal produk layanan barang dan jasa yang bisa diakses secara daring. e-Katalog mempunyai fungsi yang sama seperti *online shop* namun produk yang tersedia khusus untuk kebutuhan pemerintah dan harga yang ditawarkan sudah merupakan harga termurah yang bisa didapatkan oleh pemerintah. Sehingga, harga yang terdapat pada e-Katalog tidak dapat dijadikan sebagai patokan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena akan ada kemungkinan tidak ada penawaran yang masuk disebabkan perbedaan variabel komponen penentuan harga yang digunakan oleh penyedia melalui e-katalog dan diluar e-katalog. Katalog elektronik sendiri untuk pengelolaan awal komoditasnya dilakukan secara tunggal oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan dikenal dengan katalog elektronik nasional. Dengan semakin berkembangnya komoditas yang diperlukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) pemerintah, maka LKPP membuat katalog elektronik sektoral yaitu katalog elektronik yang komoditasnya dikelola langsung oleh K/L/D/I terkait. Begitu pun untuk katalog elektronik lokal yaitu komoditas katalog elektronik yang komoditasnya dikelola langsung oleh pemerintah daerah terkait.

Kementerian Pertanian (Kementan) merupakan salah satu kementerian yang menjajaki kemungkinan penggunaan katalog sektoral dalam sektor pertanian. Kebutuhan terkait pupuk, benih, bibit, dan alat mesin pertanian yang cukup masiv membuat Syahrul

Yasin Limpo, Menteri Pertanian (Mentan), mengunjungi Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto di gedung LKPP dalam rangka menjalin kerjasama pengembangan katalog elektronik sektoral.

Selain membahas pengembangan katalog elektronik sektoral, Mentan juga membahas perluasan kerjasama dari kedua belah pihak dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia PBJ di Kementan agar pengadaan tepat sasaran sesuai dengan 6 T yaitu tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, tepat harga dan tepat penyedia.

Hasil dari pengembangan katalog sektoral Kementan, saat ini terdapat tujuh komoditas pada katalog elektronik sektoral Kementan yaitu,

- benih padi dan jagung,
- pupuk dan pestisida,
- benih perkebunan,
- benih hortikultura,
- alat dan mesin pertanian,
- kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau, serta
- sarana budidaya peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan total sebanyak 237 penyedia, 131 jenis produk dan 2439 produk yang ditawarkan dalam katalog elektronik sektoral Kementan untuk ketujuh komoditas tersebut. Pihak unit kerja eselon I yang terlibat dalam katalog sektoral ini adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Katalog sektoral dibuat untuk mempermudah pengelolaan komoditas yang dibutuhkan oleh Kementerian tertentu karena kementerian tersebut lebih mengetahui item yang dibutuhkan oleh satuan kerja dalam Kementerian/Lembaga tersebut. Sehingga komoditas yang disajikan dalam katalog sektoral Kementerian/Lembaga akan tepat guna, dapat dibeli dengan harga yang kompetitif untuk pemerintah.

Proses pengajuan atau memasukkan produk ke dalam katalog sektoral tentu saja harus melewati beberapa tahapan. Sesuai dengan informasi yang diberikan oleh LPSE Kementerian melalui sosial media resmi mereka di @lpse.kementan.

Gambar 2. Infografis Proses Mengajukan Produk Ke Dalam Katalog Sektoral

Yang harus diperhatikan di awal adalah penyedia harus sudah memiliki akun SPSE. Kemudian sebelum masuk ke dalam aplikasi,

penyedia menyiapkan data komoditas yang akan dimasukkan ke dalam katalog sektoral. Setelah itu penyedia berkoordinasi dengan unit eselon I teknis yang terkait dengan kebutuhan komoditas tersebut. Selanjutnya eselon I teknis akan menyusun dokumen usulan komoditas katalog sektoral. Bila eselon I teknis sudah memprosesnya ke dalam aplikasi e-katalog.lkpp.go.id, penyedia dapat mulai mendaftarkan komoditas mereka ke dalam aplikasi menggunakan akun/*user id* SPSE. Langkah berikutnya adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh tim verifikator, UKPBJ dan calon penyedia katalog sektoral. Ketika semua sudah selesai dilakukan verifikasi serta negosiasi yang dibutuhkan, komoditas akan tayang di katalog sektoral dan mulai bisa dilakukan pembelian oleh PPK dan atau Pejabat Pengadaan.

Kendala yang biasanya muncul saat akan melakukan pembelian komoditas sektoral adalah tombol di katalog elektronik sektoral untuk pembelian komoditas tidak muncul. Hal ini disebabkan karena pejabat pengadaan dan atau PPK belum diberikan hak akses untuk membeli komoditas sektoral tersebut. Pembelian komoditas di katalog elektronik sektoral Kementan dapat dilakukan oleh seluruh pejabat pengadaan dan PPK di seluruh Indonesia setelah mereka dibukakan hak akses oleh admin katalog Kementan. Akun yang diajukan untuk dibukakan akses ke katalog elektronik sektoral tidak harus akun atau *user id* yang dikeluarkan oleh Kementan. Pejabat pengadaan dan PPK dapat tetap menggunakan akun lama mereka yang mungkin sudah dibuat di LPSE awal mendaftar (LPSE pemerintah daerah). Proses pembukaan hak akses dapat dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan ke Kepala Biro Umum dan Pengadaan melalui email ***ukpbj.tender@pertanian.go.id.*** Format surat permohonan tersebut dapat diunduh melalui menu Konten Khusus pada situs lpse.pertanian.go.id atau pada pranala ***https://lpse.pertanian.go.id/eproc4/publik/detil_special?beritaId=6956212***. Pada surat tersebut terdapat informasi yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu nama PPK dan atau pejabat pengadaan, NIP, username serta komoditas yang akan dibeli.

Pembelian melalui katalog sektoral mempermudah dan mempersingkat proses pembelian komoditas dalam bidang pertanian yang dibutuhkan oleh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Info Data Pertanian

Nilai Tukar Petani (NTP)

- NTP nasional Juli 2021 sebesar 103,48 atau turun 0,11 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,03 persen; lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,14 persen.
- Secara nasional, NTP Januari--Juli 2021 sebesar 103,29 dengan nilai It sebesar 111,21 sedangkan Ib sebesar 107,67.
- Pada Juli 2021, NTP Provinsi Riau mengalami penurunan terbesar (2,29 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan tertinggi (2,58 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.
- Pada Juli 2021 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,14 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada seluruh kelompok pengeluaran, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
- Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) nasional Juli 2021 sebesar 103,77 atau turun 0,10 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Inflasi

- Pada Juli 2021 terjadi inflasi sebesar 0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,54. Dari 90 kota IHK, 61 kota mengalami inflasi dan 29 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 1,51 persen dengan IHK sebesar 108,33 dan terendah terjadi di Sampit sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 107,10. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Manokwari sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 109,89 dan terendah terjadi di Maumere dan Samarinda masing-masing sebesar 0,01 persen dengan IHK masing-masing sebesar 106,65 dan 105,69.
- Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,08 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,24 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,18 persen; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,05 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok transportasi sebesar 0,01 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,07 persen.
- Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juli) 2021 sebesar 0,81 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,52 persen.
- Komponen inti pada Juli 2021 mengalami inflasi sebesar 0,07 persen. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender (Januari–Juli) 2021 sebesar 0,82 persen dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,40 persen.

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)